

PANDANGAN
FRAKSI PARTAI DEMOKRAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
ATAS RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2022
BESERTA NOTA KEUANGANNYA

Disampaikan oleh : RIZKI AULIA RAHMAN NATAKUSUMAH

Nomor Anggota : A-560

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh.

Salam sejahtera bagi kita semua,

Om Swastiastu,

Namo Buddhaya,

Salam kebajikan.

Demokrat Bersama Rakyat!

Yang terhormat

- Pimpinan DPR RI,
- Para Anggota DPR RI dan hadirin yang kami hormati,
- Menteri Keuangan RI Beserta Jajaran,
- Menteri Hukum dan HAM RI Beserta Jajaran,
- Menteri PPN/Kepala BAPPENAS RI Beserta Jajaran.
- Rekan-rekan media dan hadirin yang kami hormati baik yang hadir secara fisik maupun virtual

Puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahuwataala, Tuhan Yang Maha Esa, kami panjatkan atas rahmat dan karunia-Nya, karena hingga hari ini kita masih diberi anugerah kesehatan dan keselamatan, ditengah pandemi Covid 19 yang masih melanda negeri tercinta. Dalam kesempatan ini, Fraksi Partai Demokrat akan menyampaikan Pandangan Umum Fraksi atas RUU tentang APBN 2022 beserta

Nota Keuangannya, sebagaimana telah disampaikan dalam Pidato Kenegaraan Presiden RI Joko Widodo pada hari Senin, 16 Agustus 2021, dalam Rapat Paripurna di Gedung DPR/MPR RI. Masih dalam suasana Hari Kemerdekaan, semoga membawa berkah bagi Bangsa Indonesia. **Dirgahayu Indonesia!**

SAUDARA PIMPINAN, PARA ANGGOTA DEWAN, JAJARAN KEMENTERIAN RI SERTA HADIRIN YANG KAMI HORMATI,

APBN tahun anggaran 2022 menjadi masa transisi bagi Pemerintah untuk memasuki APBN tahun 2023 dimana ambang batas defisit maksimal akan kembali ke angka maksimal 3 persen. Namun, sejak Juni 2021, pandemi Covid-19 di Indonesia memasuki fase baru dimana varian Delta dengan cepat menyebar di Indonesia, rekor tertinggi yakni 56 ribu pasien terkonfirmasi positif dalam satu hari. Pemerintah pada akhirnya menarik rem darurat dengan menerapkan PPKM Darurat selama 2 minggu, sejak awal Juli 2021, yang sampai saat ini masih diperpanjang dan dievaluasi secara berkala.

FPD mendorong kepada Pemerintah untuk terus mengkampanyekan disiplin dan ketaatan menjaga protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan, menghindari kerumunan, menjaga jarak, serta membatasi mobilisasi. Selain itu, upaya *testing*, *tracing* dan *treatment* kepada setiap kontak erat pasien positif baru untuk mengendalikan laju penyebaran covid-19 harus ditingkatkan.

Program vaksinasi sebagai *game changer* dalam menghadapi pandemi harus ditingkatkan capaiannya. Distribusi vaksin perlu mendapatkan perhatian agar lebih cepat dan menyeluruh. Per tanggal 17 Agustus 2021, capaian vaksin dengan dosis lengkap (2 dosis) telah mencapai angka 28,8 juta penduduk dengan kecepatan penambahan harian sebesar 700 ribu dosis. **Walaupun realisasinya belum mencapai target sebanyak satu juta vaksinasi per hari, FPD tetap memberi apresiasi terhadap setiap upaya Pemerintah untuk mengentaskan Indonesia dari keterpurukan akibat pandemi.** Kita sadar bahwa kesuksesan penyelenggaraan APBN dan Kebijakan-kebijakan yang menyertainya sangat bergantung pada kemampuan kita mengendalikan pandemi ini.

DJA
- (SD2)

SAUDARA PIMPINAN, PARA ANGGOTA DEWAN, JAJARAN KEMENTERIAN RI SERTA HADIRIN YANG KAMI HORMATI,

Dengan semangat kebangsaan yang tidak pernah padam, marilah kita semua bergandengan tangan bersatu demi kepentingan rakyat Indonesia. Pandemi Covid-19 memaksa Pemerintah untuk lebih bekerja keras dengan *extra effort* untuk mewujudkan setiap kerja dan kebijakan yang dicanangkan.

Upaya Pemerintah untuk meningkatkan pemerataan kesejahteraan penduduk, meningkatkan SDM Unggul, Berintegritas dan Berdaya Saing serta melanjutkan pembangunan infrastruktur masih menghadapi tantangan yang terjal. Untuk itu, **Fraksi Partai Demokrat memberikan beberapa catatan sebagai berikut:**

1. Terkait Asumsi Makro, Defisit dan Pembiayaan RAPBN 2021, Fraksi Partai Demokrat memberikan catatan sebagai berikut:
 - a. Asumsi pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan sebesar 5,0-5,5 persen adalah target yang optimis di tengah ketidakpastian yang masih tinggi. Hal utama yang menjadi kendala adalah pandemi Covid-19 yang diperkirakan masih melanda dunia sampai pertengahan 2022 sebagaimana rilis yang disampaikan WHO. Konsistensi dan fokus pemerintah dalam penanganan Covid 19 melalui pelaksanaan vaksinasi dan penerapan protokol kesehatan menjadi salah satu kunci berhasilnya pemerintah untuk mencapai target optimis pertumbuhan 5 persen. **FPD meminta Pemerintah untuk tetap mendorong kembali aktivitas perekonomian dan menjaga daya beli masyarakat serta memastikan perekonomian kembali berjalan agar kesejahteraan masyarakat juga membaik.** Perbaikan pada aktivitas perekonomian akan mendorong terbukanya lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
 - b. Proyeksi inflasi tahun 2022 sebesar 3 persen merupakan target yang realistis, namun pemerintah diharapkan tidak hanya fokus pada pencapaian inflasi rendah, yang perlu menjadi perhatian adalah bagaimana meningkatkan kembali permintaan dan daya beli masyarakat yang semakin terpuruk pada masa pandemi serta mendorong kembali kelangsungan dunia usaha, industri

dan UMKM yang berimplikasi pada penyerapan tenaga kerja dan pengurangan kemiskinan.

- c. Nilai tukar rupiah terhadap dolar diperkirakan bergerak pada kisaran Rp14.350 per US Dollar. Merupakan target yang cukup realistis, namun perlu diwaspadai terjadinya pembalikan arus modal, ketika Bank Sentral Amerika menghentikan kebijakan QE seiring dengan pemulihan ekonomi dan pandemi yang dapat diatasi. Dengan situasi tersebut nilai tukar rupiah pasti akan tertekan. Mencermati hal tersebut, **FPD meminta kepada pemerintah bersama BI perlu menyiapkan mitigasi resiko pembalikan arus modal, jika pada tahun 2022 terjadi perubahan kebijakan moneter Amerika Serikat dengan menghentikan kebijakan QE yang diikuti dengan menaikkan suku bunganya.**
- d. Proyeksi harga minyak mentah Indonesia (ICP) tahun 2022 yang ditargetkan pada angka US\$ 63 per barel masih memiliki kemungkinan berubah karena dinamika politik global dan geopolitik seringkali mempengaruhi harga minyak. **FPD meminta Pemerintah untuk senantiasa responsif dalam mengambil kebijakan harga minyak di tengah ketidakpastian tersebut.**
- e. Terkait *lifting* minyak dan gas, dengan realisasi *lifting* yang setiap tahun mengalami penurunan, **FPD meminta Pemerintah untuk adaptif dalam mengambil kebijakan, dan agar dapat mulai beralih ke sumber energi baru dan terbarukan serta mengembangkan *green economy* yang dapat berdampak baik bagi lingkungan di masa depan. Dengan energi yang kian terbatas, dan semakin mahal, Pemerintah perlu menggalakan kembali Gerakan Hemat Energi.**
- f. Suku Bunga SUN 10 tahun ditargetkan pada angka 6,82%. Pemerintah berkepentingan untuk memperoleh dan menjaga suku bunga SUN relatif lebih rendah, sehingga bunga utang dan *yield* surat utang pemerintah tidak menjadi beban APBN. **FPD meminta kepada pemerintah dalam penerbitan surat utang untuk pembiayaan APBN 2022 dapat diperoleh tingkat suku bunga yang lebih rendah.**

DJA
- (SD1, SD2)

g. Besaran defisit APBN 2022 diproyeksikan sebesar 4,85 persen atau sekitar Rp. 868 triliun, menjadi masa transisi bagi pemerintah untuk mencapai konsolidasi fiskal tahun 2023 dengan masimum defisit 3 persen. **FPD dapat memahami bahwa belanja pemerintah akan sulit diturunkan ditengah ketidakpastian berakhirnya pandemi.** Dengan ruang ekspansi fiskal yang semakin sempit, **FPD meminta pemerintah tetap fokus pada penanganan pandemi dan memulihkan kesehatan masyarakat** yang diikuti dengan program pemulihan ekonomi dan dunia usaha.

DJPPR

DJA
- (SD5)

h. Terhadap kebijakan Utang Negara, **Pemerintah perlu berhati-hati mengelola utang.** Semakin besar utang yang dimiliki, maka konsekuensinya adalah semakin besarnya pengeluaran negara untuk membayar cicilan pokok dan bunga utang, hal ini bisa semakin menurunkan *fiscal space* yang bisa digunakan untuk belanja produktif dalam rangka Penanganan Pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

BKF
DJP
DJA
-PNBP KND
-PNBP KL

2. Terkait Penerimaan Negara, **FPD memahami bahwa situasi perekonomian masih dalam kondisi sulit. Proses pemulihan ekonomi perlu terus dilakukan untuk mengembalikan kekuatan perekonomian.** Insentif perpajakan harus dilakukan oleh Pemerintah dengan hati-hati dan terukur agar memiliki daya ungkit terhadap perekonomian. Perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan, integrasi data perpajakan dan perbaikan tata kelola perpajakan harus benar-benar diwujudkan Pemerintah melalui kerja konkret agar Penerimaan Negara sektor Perpajakan bisa tumbuh, *tax ratio* meningkat dan tidak mengalami *Shortfall*. Perlu juga dipertimbangkan adanya sistem *punishment and reward* dalam pemungutan pajak. Selain itu, Penerimaan negara sektor PNBPN perlu ditingkatkan dengan tidak meninggalkan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah perlu tindakan yang *extraordinary* agar target peningkatan penerimaan negara melalui Perpajakan dan PNBPN bisa tercapai.

3. Terhadap rencana Belanja Negara, Pemerintah perlu dengan ketat menentukan skala prioritas kebijakan yang sesuai serta mengedepankan prinsip *spending better*. Penanganan covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional harus menjadi prioritas utama. Pemerintah sebaiknya menunda program-program yang sifatnya kurang mendesak, seperti rencana pemindahan Ibu Kota Negara. **Pemerintah juga perlu mengurangi potensi inefisiensi belanja negara** dengan mengurangi belanja-belanja yang sifatnya dukungan manajemen serta mengalihkannya kepada belanja-belanja produktif dan memicu daya ungkit aktivitas ekonomi dan daya beli masyarakat.

FPD mengingatkan kepada Pemerintah agar terus melakukan upaya perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan miskin di Indonesia. Bantuan sosial, Transformasi Subsidi, Jaring Pengaman Sosial, serta stimulus perekonomian perlu ditekankan agar disalurkan dengan tepat sasaran, sesuai dengan DTKS (tidak berganda), sehingga program perlindungan sosial benar-benar membantu masyarakat untuk berahan hidup dan meningkatkan daya beli masyarakat. **FPD meminta kepada Pemerintah untuk menyoroti *moral hazard* yang masih terjadi di tengah situasi sulit yang dihadapi Bangsa, *Ojo Korupsi Ojo Ngapusi*, Perilaku korupsi pada situasi krisis justru mencederai hati nurani rakyat.**

4. Alokasi anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) diharapkan bisa diarahkan untuk peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Upaya Pemerintah untuk membentuk SDM Unggul bisa dilakukan melalui pemanfaatan dana TKDD untuk peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan dan infrastruktur daerah. **FPD meminta Pemerintah untuk meningkatkan harmonisasi dan sinergitas kebijakan penganggaran pusat dan daerah agar kebijakan TKDD bisa untuk mempercepat kinerja serta mendorong peran daerah yang lebih besar dalam pemulihan ekonomi terutama dalam rangka peningkatan kualitas kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial dan penanganan covid-19 di daerah. Pemerintah Daerah juga diharapkan diberikan peran lebih besar dalam mengelola dana TKDD karena yang mengetahui potensi daerah adalah Pemerintah Daerah sehingga potensi ekonomi daerah dapat tergali dengan optimal.**

Terhadap banyaknya temuan dana mengendap di kas daerah, FPD berharap Dana Daerah agar benar digunakan sesuai kepentingan daerah untuk kepentingan masyarakat luas, sehingga kepala daerah diharapkan lebih produktif dan kreatif dalam mengelola dana daerah secara aman dan terukur, agar perekonomian daerah lebih terpacu dan terakselerasi .

Berdasarkan catatan diatas, maka Fraksi Partai Demokrat menyampaikan rekomendasi untuk menjadi perhatian Pemerintah, yaitu:

1. FPD meminta kepada pemerintah dalam pelaksanaan APBN 2022 tidak hanya fokus pada pencapaian target pertumbuhan ekonomi 5 persen, namun yang lebih penting adalah bagaimana peran APBN pada penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan perekonomian, sebagaimana tujuan diterbitkannya Perppu No 1 tahun 2020. Meskipun Presiden sudah menegaskan bahwa dilakukan kebijakan Gas dan Rem, FPD berharap agar penanganan kesehatan tetap menjadi fokus utama karena sumber ketidakpastian saat ini adalah virus Covid-19. ***Putting people's health and safety first***. Jika pemulihan kesehatan masyarakat dan pengendalian pandemi Covid-29 dapat berjalan dengan baik, maka akselerasi pembangunan ekonomi dan peningkatan kinerja dunia usaha bisa lebih cepat dijalankan dalam rangka pemulihan ekonomi nasional.

Kemenkes
Kemenko Ekon
DJA
- Abid PMK
- Abid Ekontim
- Abid
Polhukhankam
BABUN
- (SD2)

2. FPD meminta Pemerintah untuk mengarahkan kebijakan belanja negara yang memiliki ***multiplier effect*** yang kuat terhadap perekonomian serta efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. belanja negara harus diarahkan untuk berorientasi pada hasil, efektif, efisien, terukur, dan teruji sehingga pelaksanaan anggaran tidak sekedar *business as usual*. Reformasi struktural hendaknya dijalankan oleh Pemerintah dengan ***monitoring*** dan evaluasi secara berkala sehingga berbagai kendala dan dampak negatif yang mungkin muncul dalam penerapannya bisa segera diatasi yang berimplikasi pada perbaikan struktur kesejahteraan masyarakat.

DJA
- (SD2, SD3)

DJA
- (SD4)

3. FPD meminta kebijakan Belanja Subsidi diarahkan agar lebih tepat sasaran, **Pemerintah harus memperhatikan dan bersungguh-sungguh dalam menyosialisasikan transformasi subsidi LPG 3 kg dan Listrik menjadi subsidi langsung**, sebagai ganti hilangnya dana kompensasi di tahun 2022 sesuai hasil Panja Belanja Pemerintah Pusat dalam Pembahasan Pendahuluan RAPBN 2022 dan RDP Banggar tanggal 7 April 2021.

BKF

4. Kebijakan fiskal perlu diarahkan agar mampu mendorong terciptanya pengelolaan fiskal yang semakin sehat dan berdaya sehingga bisa mendukung pemantapan pemulihan ekonomi, melanjutkan program perlindungan sosial, meningkatkan mutu pendidikan, serta penguatan sistem kesehatan.

5. FPD meminta pemerintah memprioritaskan kebijakan yang *pro-growth* (pro pertumbuhan), *pro-poor* (pro kemiskinan), *pro-environment* (pro-lingkungan) dan *pro-job* (pro penciptaan lapangan kerja) agar tercipta lapangan kerja baru untuk mengurangi jumlah pengangguran yang meningkat karena pandemi Covid-19. Selain itu, perbaikan sistem pendidikan dan kualitas hasil pendidikan juga merupakan salah satu upaya meningkatkan kualitas SDM yang berintegritas, unggul dan berdaya saing agar bangsa kita tidak mengalami Lost COVID Generation. **Inklusifitas berkelanjutan melalui pendekatan *four tracks strategy* diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi guna mengurangi pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan distribusi pendapatan yang secara keseluruhan untuk menciptakan SDM Indonesia yang berkualitas.**

BKF

SAUDARA PIMPINAN, PARA ANGGOTA DEWAN, JAJARAN KEMENTERIAN RI SERTA HADIRIN YANG KAMI HORMATI,

Berdasarkan pandangan yang telah kami sampaikan, Fraksi Partai Demokrat DPR RI menyatakan dapat menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 beserta nota keuangannya untuk dilanjutkan dalam pembahasan tingkat I dan II di DPR RI.

Kita masih harus melihat ke depan, bergandengan tangan agar negara yang kita cintai ini makin maju, makin rukun dan damai, makin adil dan makin sejahtera, kita harus memiliki visi dan pikiran cerdas serta mau bekerja keras tanpa lelah. Kita harus yakin, bahwa badai akan berlalu.

Harapan Rakyat, Perjuangan Demokrat!

Bersama Kita Kuat, Bersatu Kita Bangkit!

Wabillahittaufik Walhidayah, Wassalamu'alaikum Wr.Wb

JAKARTA, 19 AGUSTUS 2021

PIMPINAN FRAKSI PARTAI DEMOKRAT

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

K e t u a

DR. EDHIE BASKORO YUDHOYONO, M.Sc

Nomor Anggota: A-554

Sekretaris



MARWAN CIK ASAN, M.M.

Nomor Anggota : A-535